STRATEGI PENGEMBANGAN PENGOLAHAN PERIKANAN BERBASIS *BLUE ECONOMY* DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG

Surya Krishna Priyodani
NPP. 33.0329
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: marveloussuryakrishna@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Eko Budi Santoso, M. T.
Email: budi_santoso@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the problem of the "Infrastructure Paradox" in Pangkalpinang City, where the city possesses the largest fisheries processing infrastructure but contributes only 0.78% to the province's marine fish production, with 75% of raw materials supplied from outside the region. The downstream industry is trapped in exporting raw frozen fish without deep processing, while MSMEs are marginalized due to a lack of processing certificates (<5% possess SKP). Furthermore, MSMEs are highly vulnerable to raw material scarcity and extreme price spikes (up to IDR 110,000 per kilogram) driven by corporate monopolies and ecological degradation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the internal and external conditions of Blue Economy-based fisheries processing and formulate development strategies in Pangkalpinang City.* ***Method:*** *This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach. The technique of collecting data is done by in-depth interviews (7 key informants), field observations, and document reviews, which are then analyzed using SWOT based on the four pillars of the Blue Economy.* ***Result:*** *This study found that the governance of fisheries processing has not optimally fulfilled the Blue Economy pillars. In the economic growth dimension, the massive Cold Storage infrastructure fails to create high value-added products as it remains focused on primary freezing for export. In the social inclusion dimension, a severe gap exists where less than 5% of MSMEs possess SKP due to poor sanitation compliance, contrasting with corporations that hold HACCP. In the livelihood improvement dimension, the dominance of outright purchase systems and the absence of communal buffer stocks leave MSMEs vulnerable to price hikes. In the ecological health dimension, upstream marine ecosystems and port spatial zoning require urgent restoration.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of the Blue Economy in fisheries processing in Pangkalpinang City can only achieve economic resilience if all four pillars are executed in an integrated manner among the city government, corporations, MSMEs, and the central government. It is recommended to accelerate deep processing downstreaming, construct an Integrated Processing Center via central government funds, formalize cross-regional supply partnerships, and revise marine spatial zoning.*

Keywords: *Blue Economy; Economic Resilience; Fisheries Processing; SWOT Analysis.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penulis berfokus pada permasalahan "Paradoks Infrastruktur" di Kota Pangkalpinang, di mana kota ini memiliki infrastruktur pengolahan perikanan terbesar namun hanya menyumbang 0,78% produksi ikan laut provinsi, dengan 75% bahan baku dari luar daerah. Industri hilir terjebak pada ekspor ikan beku primer tanpa inovasi lanjutan, sementara pelaku UMKM terpinggirkan (kurang dari 5% memiliki SKP). UMKM juga sangat rentan terhadap kelangkaan dan lonjakan harga bahan baku (hingga Rp110.000/kg) akibat monopoli korporasi dan ketiadaan *buffer stock*. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal serta merumuskan strategi pengembangan pengolahan perikanan berbasis *Blue Economy* di Kota Pangkalpinang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 7 informan kunci, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi, yang dianalisis menggunakan matriks SWOT berdasar empat pilar *Blue Economy*. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengolahan perikanan belum sepenuhnya memenuhi pilar *Blue Economy*. Pada dimensi pertumbuhan ekonomi, kapasitas infrastruktur *Cold Storage* hanya dimanfaatkan untuk pembekuan primer tanpa inovasi *deep processing*. Pada dimensi inklusi sosial, terjadi ketimpangan tajam di mana korporasi memiliki HACCP sementara UMKM terhambat legalitas SKP akibat kendala standar sanitasi. Pada dimensi peningkatan mata pencaharian, sistem "beli putus" dan ketiadaan cadangan komunal membuat UMKM rentan terhadap hiperinflasi harga bahan baku. Adapun pada dimensi kesehatan ekosistem, diperlukan pemulihan zonasi ruang laut dan pelabuhan yang tumpang tindih. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *Blue Economy* di Kota Pangkalpinang hanya dapat mewujudkan ketahanan ekonomi apabila keempat pilar dijalankan secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya akselerasi hilirisasi *deep processing*, pembangunan Sentra Pengolahan Terpadu melalui DAK KKP, formalisasi kemitraan tata niaga lintas daerah dan *buffer stock*, serta revisi tata ruang zonasi laut.

Kata kunci: Analisis SWOT; *Blue Economy*; Ketahanan Ekonomi; Pengolahan Perikanan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika perekonomian global saat ini menuntut pergeseran model pembangunan dari eksploitasi sumber daya alam daratan menuju pemanfaatan lautan yang berkelanjutan. Paradigma pembangunan dunia kini bertransformasi menuju *Blue Economy*, sebuah konsep yang berupaya mempromosikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan peningkatan mata pencaharian masyarakat, seraya memastikan keberlanjutan kesehatan ekosistem laut (World Bank & UN DESA, 2017). Implementasi konsep ini sering kali memunculkan perdebatan terkait orientasi tata kelola, di mana integrasi prinsip ekologi dan keadilan sosial harus berjalan seimbang agar tidak semata-mata menguntungkan pihak pemodal besar (Voyer et al., 2018). Transformasi ini menjadi sangat strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia secara konkret menargetkan kontribusi ekonomi maritim meningkat tajam menjadi 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Namun, ambisi besar dalam visi ekonomi biru ini sering kali memiliki titik buta (*blind spots*) yang mengabaikan peran

krusial sektor perikanan skala kecil, sehingga berpotensi melemahkan kontribusi laut terhadap pemberantasan kemiskinan dan ketahanan pangan lokal (Farmery et al., 2021).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki keunggulan kompetitif di sektor kelautan dengan tingkat produktivitas ekonomi ruang laut yang efisien dan nilai tukar komoditas yang tinggi. Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota provinsi, memegang peran sentral sebagai pusat jasa, perdagangan, dan simpul logistik industri pasca-panen. Perekonomian kota ini mulai bergeser secara struktural seiring kontraksi tajam pada sektor pertambangan yang anjlok dari 22,45 persen menjadi hanya 7,12 persen (BPS Kota Pangkalpinang, 2023). Transisi ekonomi tersebut menjadikan sektor hilirisasi perikanan sebagai tumpuan resiliensi yang baru, ditandai dengan penguasaan kapasitas infrastruktur penyimpanan pendingin (*Cold Storage*) berskala raksasa di tengah minimnya volume tangkapan laut lokal. Optimalisasi infrastruktur pasca-panen seperti fasilitas pendingin sesungguhnya sangat esensial untuk meminimalisasi penyusutan nilai produk (*post-harvest loss*) dan menjaga stabilitas rantai nilai perikanan di negara-negara berkembang (Kruijssen et al., 2020).

Kapasitas raksasa tersebut sayangnya tereduksi fungsinya hanya menjadi ruang transit logistik pasif bagi ikan-ikan mentah dari kabupaten penyangga untuk langsung diekspor. Tata niaga industri berskala ekspor ini pada praktiknya berjalan eksklusif dan terputus dari ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Dominasi korporasi atau tengkulak sebagai aktor perantara (*middlemen*) dalam rantai pasok pesisir sering kali mendikte harga dan mengontrol akses suplai bahan baku, yang secara sistematis memarginalkan pelaku usaha kecil (Crona et al., 2010). Ratusan unit pengolah ikan berskala mikro kesulitan bermitra dengan korporasi akibat sangat minimnya kepemilikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Padahal, penerapan standardisasi mutu dan sistem ketertelusuran (*traceability*) merupakan instrumen wajib yang dapat mentransformasi tata kelola perikanan sekaligus memberikan kepastian akses pasar formal bagi pelaku UMKM di negara selatan global (Bailey et al., 2016). Ketiadaan jaminan mutu ini menciptakan sekat formalitas yang sangat tebal, sehingga UMKM tidak memiliki akses menitipkan bahan baku saat panen raya dan menjadi sangat rentan saat harga ikan melonjak akibat cuaca ekstrem di musim paceklik.

Kesenjangan struktural inilah yang mendasari urgensi perumusan strategi pengembangan tata kelola hilirisasi perikanan yang inklusif. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung berfokus pada analisis strategi peningkatan volume produksi di sektor hulu laut lepas maupun alat tangkap nelayan tradisional (Kurniawan dkk., 2023). Kajian yang menggunakan pendekatan lingkungan strategis juga lebih banyak menitikberatkan pada perikanan tangkap hulu dengan metode kuantitatif (Maghfiroh dkk., 2024). Evaluasi mengenai Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sejauh ini masih didominasi oleh lokus pulau perbatasan yang mengkaji dimensi bina manusia, bina usaha, dan penguatan koperasi nelayan hulu (Dewi & Dadiara, 2022; Prihatini dkk., 2022). Studi mengenai implementasi kebijakan usaha perikanan di daerah kepulauan lainnya pun masih terbatas pada hambatan koordinasi, ketiadaan fasilitas Tempat Penampungan Ikan (TPI), dan keterbatasan armada tangkap (Malik & Saribulan, 2018). Belum ada penelitian komprehensif yang secara spesifik membedah strategi rekayasa tata niaga dan standardisasi mutu industri hilir di wilayah perkotaan yang mengalami anomali defisit tangkapan, sehingga penelitian ini hadir untuk merumuskan strategi ketahanan ekonomi daerah yang berbasis kelestarian dan keadilan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan paradoks pembangunan infrastruktur pengolahan perikanan di Kota Pangkalpinang, di mana daerah ini memiliki kapasitas ruang simpan *Cold Storage* terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun mengalami defisit pasokan bahan baku lokal yang kronis. Kontribusi volume tangkapan makro kota ini hanya bertengger pada angka 0,78 persen

dari total produksi provinsi, sehingga memaksa industri hilir bergantung hingga rasio 75 persen pada pasokan dari luar daerah. Fenomena paradoks ini memicu kerentanan tata niaga yang mendalam bagi keberlanjutan industrialisasi berbasis *Blue Economy* di kawasan perkotaan.

Hambatan struktural di sektor hilir ini tervalidasi dari anjloknya output Sektor Industri Pengolahan dalam struktur PDRB Kota Pangkalpinang yang mengalami kontraksi tajam sebesar 22 persen, merosot dari Rp3.265,05 Miliar pada tahun 2023 menjadi Rp2.543,49 Miliar pada tahun 2024. Ketidakstabilan performa makro ini diperparah oleh darurat legalitas mutu di tingkat akar rumput, di mana dari total 287 Unit Pengolah Ikan (UPI) aktif, kurang dari lima persen yang berhasil mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) akibat rendahnya kepatuhan terhadap standar sanitasi dan *Good Manufacturing Practices* (GMP). Ketiadaan jaminan mutu formal tersebut mengisolasi pelaku UMKM dari ekosistem industri formal, padahal sektor pengolahan lokal ini menjadi bantalan ekonomi yang padat karya bagi 649 tenaga kerja langsung yang 75,2 persen di antaranya merupakan kelompok perempuan.

Dominasi sistem transaksi "beli putus" tanpa payung kemitraan kontrak jangka panjang memberikan keleluasaan bagi korporasi bermodal besar untuk memonopoli komoditas perikanan segar berkualitas premium (*grade* A) langsung dari pengepul lintas daerah. Kekosongan regulasi stabilisasi pasar dan ketiadaan cadangan komunal (*buffer stock*) memicu hiperinflasi lokal saat musim angin barat, ditandai dengan lonjakan harga ikan Tenggiri yang meroket ekstrem hingga menyentuh Rp110.000 per kilogram di pasar tradisional. Tekanan tata niaga hilir ini berjalan simultan dengan degradasi ekologi di sektor hulu akibat masifnya pertambangan timah lepas pantai yang merusak terumbu karang dan mengusir *fishing ground* nelayan. Eksternalitas negatif tersebut memicu fenomena *High Cost Economy* berupa pembengkakan ongkos solar hingga Rp4 juta per trip perjalanan melaut, yang secara matematis menekan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir ditunjukkan oleh penurunan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 112,36 menjadi 109,35.

Kajian literatur terdahulu sejauh ini telah banyak membahas strategi peningkatan volume produksi perikanan tangkap tradisional (Kurniawan dkk., 2023), analisis kuantitatif perikanan hulu laut lepas (Maghfiroh dkk., 2024), serta diversifikasi usaha jaring pengaman level rumah tangga (Puspitasari dkk., 2023). Kendati demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji rekayasa tata niaga industri hilir perkotaan yang mengalami "Paradoks Infrastruktur". Keterbatasan tersebut terletak pada belum adanya integrasi Analisis SWOT Kualitatif dengan parameter 4 Pilar Teori *Blue Economy* untuk menjembatani kemitraan *Cold Storage* korporasi, memfasilitasi jaminan mutu UMKM, dan menyusun intervensi regulasi *buffer stock* daerah guna memitigasi defisit pasokan tanpa merusak regenerasi ekosistem laut perkotaan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini sangat krusial untuk dilaksanakan saat ini guna memberikan landasan evaluatif dan formulasi strategis yang kuat bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengawal transisi struktur ekonomi daerah dari sektor ekstraktif pertambangan timah yang kian merosot menuju sektor hilirisasi perikanan berkelanjutan berbasis *Blue Economy*. Urgensi keilmuan dan praktis dari kajian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memecahkan fenomena "Paradoks Infrastruktur", di mana kapasitas masif dari 29 unit gudang beku (*Cold Storage*) swasta berskala ekspor belum terintegrasi secara inklusif untuk menyangga kebutuhan ratusan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolahan lokal. Kegagalan dalam melaksanakan penelitian ini akan menyebabkan para pengambil

kebijakan di tingkat daerah kekurangan dasar empiris terukur untuk mengintervensi kontraksi tajam sebesar 22 persen pada lapangan usaha industri pengolahan serta menghambat penyusunan regulasi untuk mengatasi darurat legalitas mutu yang mengisolasi mayoritas pelaku usaha kerakyatan dari jaringan pasar modern. Dampak destruktif jangka panjang dari absennya rumusan strategi intervensi pasar ini adalah pembiaran terhadap asimetri tata niaga sistem "beli putus" yang menyuburkan hegemoni korporasi dan memicu hiperinflasi lokal harga bahan baku saat musim paceklik, sehingga secara langsung akan melumpuhkan mata pencaharian ratusan tenaga kerja pengolahan yang didominasi kelompok perempuan serta meningkatkan risiko kemiskinan di perkotaan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks tata kelola kelautan, pendekatan *Blue Economy*, maupun evaluasi strategi perikanan. Kajian mengenai strategi peningkatan ketahanan ekonomi perikanan berkelanjutan berbasis *Blue Economy* menggunakan metode kualitatif naratif dengan fokus pada masyarakat nelayan di tingkat mikro telah dilakukan sebelumnya (Puspitasari dkk., 2023). Analisis strategi pengembangan budidaya perikanan berbasis *Blue Economy* di Kabupaten Sumbawa juga telah dieksplorasi menggunakan instrumen perhitungan matematis *Analytical Hierarchy Process* atau AHP (Andayani dkk., 2025). Studi lain meneliti strategi pengembangan perikanan bubu tradisional di Kabupaten Bangka Selatan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengukur kesejahteraan pelaku hulu secara langsung (Kurniawan dkk., 2023). Evaluasi pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang turut dilakukan menggunakan metode analisis SWOT kuantitatif melalui perhitungan skor IFAS dan EFAS (Maghfiroh dkk., 2024). Evaluasi keberlanjutan pengembangan sumber daya kelautan secara makro di tingkat nasional dalam kerangka *Blue Economy* melengkapi tinjauan literatur yang ada (Yusuf dkk., 2025).

Sintesis dari kelima penelitian tersebut menunjukkan adanya persamaan fundamental, yakni penggunaan kerangka keberlanjutan *Blue Economy* serta pemanfaatan instrumen analisis lingkungan strategis sebagai parameter utama dalam merumuskan arah kebijakan. Perbedaan yang mencolok terlihat pada fokus sektor dan pendekatan metodologis, di mana mayoritas kajian terdahulu membidik sektor hulu (ekstensifikasi perikanan tangkap dan budidaya perdesaan) serta lebih banyak bersandar pada skoring kuantitatif maupun perhitungan matematis. Keterbatasan utama dari literatur terdahulu adalah minimnya eksplorasi pada sektor hilir (hilirisasi agroindustri), khususnya mengenai anomali tata niaga dan optimalisasi fasilitas pasca-panen berskala raksasa di kawasan perkotaan.

Penelitian saat ini mengambil posisi strategis untuk mengisi kekosongan (*research gap*) tersebut dengan fokus yang sepenuhnya diarahkan pada hilirisasi industri pengolahan perikanan. Posisi pembeda penelitian ini terletak pada penggunaan metode Matriks SWOT kualitatif dengan logika pencocokan naratif (*matching logic*) yang diikat secara presisi oleh empat pilar teori *Blue Economy*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini secara eksplisit membedah rekayasa tata niaga *Cold Storage* korporasi dan formalisasi standardisasi mutu (SKP) pelaku UMKM, guna menghasilkan rumusan ketahanan ekonomi daerah yang aplikatif bagi Kota Pangkalpinang di tengah anomali defisit tangkapan bahan baku lokal.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menyajikan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) yang membedakannya secara eksplisit dari beberapa studi terdahulu, baik dari segi objek, metode, teori, maupun luaran kebijakan. Fokus kajian diletakkan pada penyelesaian fenomena "Paradoks Infrastruktur" pengolahan hasil laut di wilayah perkotaan (*hub* logistik) yang mengalami defisit pasokan hulu, yang membedakannya dari

kajian peningkatan volume penangkapan ikan tradisional di kawasan perdesaan pesisir (Kurniawan dkk., 2023; Maghfiroh dkk., 2024). Sudut pandang analisis dalam penelitian ini murni menggunakan logika pencocokan strategis kualitatif (*matching logic*) pada Matriks SWOT. Pendekatan kualitatif naratif tersebut berbeda secara diametral dengan metode pembobotan skor matematis IFAS/EFAS kuantitatif (Maghfiroh dkk., 2024) ataupun model matematika *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pada kajian sub-sektor budidaya perikanan (Andayani dkk., 2025).

Kerangka teoritis dalam penelitian ini secara khusus mengintegrasikan instrumen manajemen strategis SWOT sektor publik dengan parameter rigid dari 4 Pilar Teori *Blue Economy* (pertumbuhan ekonomi sirkular, inklusi sosial, peningkatan mata pencaharian, dan kesehatan ekosistem). Sintesis konseptual tersebut berbeda dengan evaluasi ketahanan finansial jaring pengaman level rumah tangga nelayan yang menggunakan pendekatan kualitatif naratif (Puspitasari dkk., 2023), serta berbeda dari evaluasi keberlanjutan makro-nasional (Yusuf dkk., 2025). Kebaruan dari aspek kebijakan diwujudkan melalui perumusan intervensi regulasi lokal yang konkret berupa alokasi *buffer stock* komunal daerah dan penerapan kuota retensi lokal (*Local Retention Quota*), yang belum pernah ditawarkan dalam rumpun penelitian hilirisasi pasca-panen kelautan sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal serta merumuskan strategi pengembangan pengolahan perikanan berbasis *Blue Economy* dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan mendasar untuk membedah secara komprehensif fenomena "Paradoks Infrastruktur" hilirisasi perikanan di Kota Pangkalpinang yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik kuantitatif semata. Penggunaan paradigma post-positivisme membantu peneliti menggali realitas sosial ekonomi pelaku usaha mikro, dinamika operasional utilitas infrastruktur raksasa, serta efektivitas regulasi pemerintah secara mendalam berdasarkan kata-kata tertulis maupun lisan (Ardieansyah dkk., 2023). Pendekatan studi kasus dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas rantai pasok industri pasca-panen secara alamiah tanpa adanya manipulasi variabel dari peneliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang menetapkan 7 informan kunci berdasarkan kriteria kompetensi, penguasaan masalah operasional, dan otoritas dalam pengambilan keputusan (Nurdin & Hartati, 2019). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang bertindak sebagai informan kunci karena memiliki otoritas puncak serta wawasan komprehensif terkait arah makro kebijakan ketahanan ekonomi daerah. Informan utama dan pendukung mencakup Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Subkoordinator Bina Usaha Hasil Perikanan, pengelola fasilitas *Cold Storage* swasta (PT SHL dan PT CBLA), serta pemilik Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala UMKM seperti Otak-Otak Sanjaya. Kombinasi ragam informan tersebut dipilih secara sengaja untuk memperoleh gambaran yang utuh dari

sisi regulator, praktisi korporasi berskala ekspor, hingga pelaku usaha kerakyatan di tingkat akar rumput.

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini bersandar pada prinsip Triangulasi Sumber guna menjamin validitas dan keabsahan data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Implementasi pengujian keabsahan ini dilakukan dengan menjalankan ketiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi secara simultan, sehingga data yang diperoleh dari pihak regulator Dinas Kelautan dan Perikanan, praktisi korporasi *Cold Storage*, dan pelaku usaha mikro dapat saling silang untuk mengonfirmasi serta memvalidasi fakta riil mengenai tata niaga perikanan di Kota Pangkalpinang (Nurdin & Hartati, 2019).

Analisis data menerapkan model analisis interaktif yang berlangsung secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data di lapangan (Miles et al., 2014). Tahapan analisis kualitatif ini dijalankan melalui tiga komponen utama, yaitu reduksi data untuk menyaring dan mengklasifikasikan temuan lapangan secara tematik, penyajian data (*data display*) dalam bentuk matriks tabel serta narasi deskriptif, hingga penarikan dan verifikasi kesimpulan (Simangunsong, 2017). Hasil reduksi data dikategorikan secara rigid ke dalam parameter empat dimensi teori *Blue Economy* yang mencakup pilar pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, peningkatan mata pencaharian, dan kesehatan ekosistem. Komponen strategis internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta eksternal (Peluang dan Ancaman) tersebut selanjutnya disilangkan menggunakan logika pencocokan (*matching logic*) pada instrumen Matriks SWOT guna menghasilkan rumusan intervensi kebijakan publik yang aplikatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan lokus pengamatan yang dipusatkan di Kawasan Industri Ketapang, Pelabuhan Pangkalbalam, sentra UMKM kuliner, serta Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang. Pengumpulan data primer dijalankan secara intensif selama kurang lebih satu bulan, terhitung sejak tanggal 5 sampai 24 Januari 2026. Batasan rentang waktu tersebut diselaraskan dengan kalender akademik instansi guna menangkap potret dinamika tata niaga perikanan secara aktual dan kontekstual sesuai dengan kondisi riil yang sedang berjalan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis tata kelola dan merumuskan strategi pengembangan pengolahan perikanan di Kota Pangkalpinang menggunakan kerangka teori *Blue Economy* (World Bank & UN DESA, 2017) yang mencakup empat pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, peningkatan mata pencaharian, dan kesehatan ekosistem. Diagnosis dari keempat pilar tersebut kemudian disintesiskan menggunakan instrumen manajemen strategis SWOT (Rangkuti, 2018). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth)*

Penulis melakukan pengukuran terhadap pilar pertumbuhan ekonomi melalui evaluasi tingkat pemanfaatan infrastruktur *Cold Storage* berskala makro dan tingkat inovasi diversifikasi produk industri. Kota Pangkalpinang memiliki kapasitas modal fisik yang sangat masif, namun penggunaannya belum merepresentasikan rekayasa nilai tambah yang optimal.

Tabel 1.
Analisis Komparasi Produksi Perikanan Tangkap Lokal dan Estimasi Kapasitas Infrastruktur Industri (Tahun 2024-2025)

Indikator Kinerja	Realisasi/Kapasitas	Keterangan
Total Produksi Tangkap Lokal	3.684,24 Ton/Tahun	Rata-rata produksi nelayan lokal hanya sekitar ± 10 Ton per hari.
Daya Simpan *Cold Storage* Eksisting	> 1.344 Ton	Sangat masif, berpusat di 29 unit fasilitas.
Rasio Ketergantungan Bahan Baku Eksternal	± 75%	Ditutupi oleh pasokan dari kabupaten penyangga (Bangka Selatan).

Sumber: Sintesis Data Statistik Produksi dan Hasil Wawancara Mendalam, 2026.

Pada Tabel 1 terlihat sebuah anomali struktural di mana volume tangkapan lokal sangat minim berhadapan dengan kapasitas daya simpan gudang beku yang raksasa. Hal ini menyebabkan infrastruktur *Cold Storage* tereduksi fungsinya sebatas ruang transit logistik bahan mentah ekspor. Temuan ini dipertegas oleh Manajer *Cold Storage* Surya Hasil Laut Bapak Hadiyanto yang mengatakan bahwa di fasilitasnya mereka cuma *nge-pack* saja di mana ikan masuk kemudian disortir lalu dibekukan dan langsung dikirim dalam bentuk *wholefish* atau ikan utuh ke Malaysia maupun pasar lokal tanpa adanya proses pengolahan lanjutan. Penulis menyimpulkan bahwa orientasi tata kelola yang eksklusif pada pembekuan primer tanpa diversifikasi seperti *surimi* mengakibatkan daerah kehilangan potensi penciptaan *multiplier effect* ekonomi yang besar.

3.2. Inklusi Sosial (*Social Inclusion*)

Penulis melakukan pengukuran terhadap inklusi sosial melalui evaluasi tingkat kesenjangan kepemilikan jaminan mutu berupa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) serta *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) antara korporasi besar dan pelaku UMKM lokal.

Tabel 2.
Ketimpangan Kepemilikan Jaminan Mutu (SKP/HACCP) pada Industri Pengolahan Perikanan

Skala Usaha	Jumlah Unit Aktif	Kepemilikan HACCP (Ekspor)	Kepemilikan SKP (Domestik)
Korporasi (Menengah - Besar)	4 Perusahaan	100% (4 Perusahaan)	100% (4 Perusahaan)
UMKM (Rumah Tangga - Kecil)	287 UPI	0%	< 5% (Hanya 4-5 UPI)

Sumber: Rekapitulasi Data SKP Bidang P2HP DKP Kota Pangkalpinang 2024, Diolah oleh Penulis 2026.

Berdasarkan Tabel 2 terdapat ketimpangan administratif yang sangat tajam di mana seluruh korporasi besar berhasil menguasai sertifikasi ekspor secara paripurna, sementara dari 287 Unit Pengolah Ikan skala UMKM kurang dari 5 persen yang berhasil mengantongi SKP. Kesenjangan ini

dijelaskan lebih lanjut oleh Sub Koordinator Bina Usaha DKP Kota Pangkalpinang Ibu Rohmiati yang mengatakan bahwa untuk perusahaan *Cold Storage* eksportir keempatnya sudah memiliki SKP dan HACCP sebagai syarat ekspor, namun untuk skala UMKM baru dalam hitungan jari yang memilikinya karena pegawai UMKM banyak yang belum mematuhi SOP dasar sehingga sangat sulit untuk mengubah perilaku kerja higienis mereka jika hanya sekadar diarahkan secara lisan. Berdasarkan observasi di lapangan, penulis juga menemukan bahwa keterbatasan modal UMKM untuk merenovasi infrastruktur fisik dapur kedap air menjadi akar kegagalan pemenuhan standar sanitasi industri yang secara langsung meminggirkan produk kerakyatan dari akses pasar ritel modern.

3.3. Peningkatan Mata Pencaharian (*Improving Livelihoods*)

Pengukuran pilar mata pencaharian membedah daya lenting atau resiliensi pelaku usaha mikro di tengah sistem tata niaga komoditas dan ketersediaan bahan baku. Defisit pasokan lokal memaksa industri UMKM bergantung pada suplai dari luar daerah yang memicu hiperinflasi lokal saat musim angin barat hingga harga ikan Tenggiri meroket ekstrem mencapai Rp110.000 per kilogram.

Kondisi kerentanan rantai pasok ini diakui oleh Kepala DKP Kota Pangkalpinang Bapak Oktaviandi yang mengatakan bahwa hasil nelayan lokal di Kota Pangkalpinang hanya mampu memenuhi 25 persen kebutuhan industri, sedangkan 75 persen sisanya masuk ke eksportir dari luar daerah seperti Bangka Selatan sehingga menjadikan Pangkalpinang sebenarnya hanya sebatas tempat singgah atau transit logistik saja. Di lapangan, ketiadaan intervensi cadangan stok dari pemerintah diperparah oleh hegemoni sistem beli putus yang mematikan. Keadaan ini sangat berdampak pada pelaku usaha kecil sebagaimana penuturan Manajer Otak-Otak Sanjaya Bapak Destin yang mengatakan bahwa kualitas ikan lokal kurang bagus untuk produk premium sehingga mereka harus menarik barang segar dari daerah Sadai atau Toboali yang mana ongkos logistiknya mahal dan harganya sangat fluktuatif kalau sedang musim angin. Penulis menyimpulkan bahwa tata niaga pasar bebas tanpa payung kemitraan formal menekan margin keuntungan UMKM dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian 649 tenaga kerja pengolahan lokal.

3.4. Kesehatan Ekosistem (*Ecological Health*)

Kesehatan ekosistem dievaluasi melalui dampak eksternalitas aktivitas di hulu terhadap biaya operasional industri, serta kelayakan zonasi spasial pelabuhan di kawasan hilir. Observasi di kawasan pesisir mendapati aktivitas pertambangan timah isap lepas pantai yang bersinggungan langsung dengan wilayah tangkap nelayan, memicu fenomena biaya operasional tinggi yang menurunkan Nilai Tukar Nelayan dari 112,36 pada tahun 2022 menjadi 109,35 pada tahun 2024.

Penataan fisik pelabuhan pendaratan ikan dilaporkan mengalami disfungsi tata ruang yang kronis. Keruwetan tata ruang pelabuhan ini turut dikeluhkan oleh representasi pihak industri yakni Manajer *Cold Storage* Surya Hasil Laut Bapak Hadiyanto yang mengatakan bahwa prioritas utama yang dibutuhkan adalah perbaikan fasilitas pelabuhan TPI Ketapang yang saat ini kurang memenuhi persyaratan karena kapal ekspor dan kapal nelayan masih menggunakan tempat labuh yang sama dan saling bercampur. Fenomena *mixed-use zoning* ini memicu risiko kontaminasi silang yang sangat berbahaya karena berpotensi menggugurkan legitimasi sertifikasi HACCP internasional milik korporasi kapan saja.

3.5. Strategi Pengembangan Pengolahan Perikanan Berbasis SWOT

Berdasarkan diagnosis keempat pilar di atas, penulis merumuskan empat strategi integratif melalui penyilangan Matriks SWOT untuk mewujudkan ketahanan ekonomi Kota Pangkalpinang:

1. Strategi SO (Akselerasi Hilirisasi): Mengintervensi stagnasi *Cold Storage* dengan menerbitkan insentif pajak daerah bagi korporasi yang membangun lini manufaktur *deep processing* (seperti *surimi* dan tepung ikan), serta mendigitalisasi pemasaran 287 UPI mikro ke *marketplace* nasional.
2. Strategi WO (Penguatan Inklusi Sosial): Membangun Sentra Pengolahan Terpadu (Dapur Komunal berstandar GMP) yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) KKP RI untuk memfasilitasi UMKM meraih SKP tanpa harus menanggung beban investasi fisik mandiri.
3. Strategi ST (Ketahanan Rantai Pasok): Memutus sistem oligopoli "beli putus" dengan memfasilitasi *Memorandum of Understanding* (MoU) kemitraan bahan baku jangka panjang antara UMKM Pangkalpinang dan nelayan Bangka Selatan, serta menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang kewajiban alokasi *buffer stock* sebesar 5–10% bagi korporasi besar.
4. Strategi WT (Pemulihan Ekosistem): Menertibkan *mixed-use zoning* di TPI Ketapang dengan memisahkan secara fisik dermaga kargo ekspor dan dermaga tradisional, serta mendorong revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi untuk melindungi *fishing ground* dari konsesi tambang timah.

3.6. Diskusi Temuan Utama

Pelaksanaan hilirisasi industri pengolahan perikanan memiliki urgensi absolut sebagai substitusi penyelamat ekonomi Kota Pangkalpinang di tengah kejatuhan sektor ekstraktif pertambangan. Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena "Paradoks Infrastruktur" terjadi akibat kelemahan regulasi pemerintah daerah yang membiarkan utilitas gudang pendingin raksasa bergerak bebas dalam rezim pasar bebas, sehingga meminggirkan inklusi sosial bagi kelas pekerja UMKM.

Prasyarat keberlanjutan ekonomi yang menitikberatkan pada pentingnya kesehatan ekosistem kelautan mengonfirmasi bahwa kelestarian habitat hulu secara langsung mendikte stabilitas Harga Pokok Produksi agroindustri hilir (Yusuf dkk., 2025). Pendekatan tersebut berbeda dengan fokus pembenahan efisiensi armada penangkapan hulu melalui pendekatan kuantitatif (Maghfiroh dkk., 2024). Penelitian ini menolak penerapan ekstensifikasi hulu karena perbedaan karakteristik objek penelitian; di Kota Pangkalpinang, permasalahan utama bukanlah kurangnya kapasitas tangkap di laut lepas, melainkan inefisiensi pengelolaan *Cold Storage* di hilir akibat defisit bahan baku lokal. Temuan ini memperkuat posisi bahwa intervensi pembangunan bagi kawasan perkotaan pelabuhan (*hub*) harus difokuskan mutlak pada rekayasa hilirisasi *deep processing*, standardisasi dapur komunal, dan regulasi ketahanan rantai pasok silang-daerah sejalan dengan prinsip sirkularitas ekonomi (Andayani dkk., 2025).

Urgensi penyediaan jaring pengaman ekonomi di tingkat perkotaan harus diwujudkan melalui formalisasi regulasi kuota retensi lokal (*Local Retention Quota*) agar UMKM tidak tergulung oleh dominasi korporasi besar, yang memiliki esensi sejalan dengan gagasan perlindungan finansial mikro (Puspitasari dkk., 2023). Ketiadaan intervensi *buffer stock* komunal dalam aktivitas hilirisasi yang masif justru memicu ketimpangan akses terhadap sumber daya bagi pelaku usaha kecil, yang menjadi poin pelengkap bagi kajian perikanan tradisional sebelumnya (Kurniawan dkk., 2023).

Sintesis secara ringkas mengenai temuan utama dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Paradoks Infrastruktur: Ketimpangan ekstrem antara kapasitas *Cold Storage* yang sangat besar dengan ketersediaan bahan baku lokal menuntut adanya kebijakan *buffer stock* komunal daerah.

b. Kesenjangan Mutu: Diskoneksi regulasi yang meminggirkan 95% UMKM dari akses pasar formal memerlukan intervensi penyediaan fasilitas Dapur Komunal terstandar.
c. Daya Juang UMKM: Sektor industri kerakyatan memiliki resiliensi tinggi secara swadaya untuk bertransformasi ke arah hilirisasi lanjutan meskipun berada di tengah keterbatasan pasokan hulu.
d. Integritas Ekosistem: Kelangsungan ekonomi sektor hilir sangat bergantung pada pengendalian eksternalitas tambang di hulu yang mensyaratkan penataan zonasi fisik ruang pelabuhan secara ketat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa strategi hilirisasi perikanan berbasis *Blue Economy* bukan sekadar peningkatan output produksi, melainkan sebuah rekayasa tata niaga yang memerlukan keseimbangan antara intervensi korporasi besar dan pemberdayaan inklusif bagi pelaku UMKM lokal.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat utama dalam strategi pengembangan pengolahan perikanan di Kota Pangkalpinang, yang meliputi tingginya tingkat degradasi ekologi akibat aktivitas pertambangan timah lepas pantai sehingga merusak *fishing ground* nelayan lokal. Hambatan eksternal tersebut diperparah oleh ketergantungan struktural industri hilir perkotaan terhadap pasokan bahan baku lintas kabupaten yang mencapai rasio ekstrem sebesar 75 persen. Keterbatasan ruang fiskal APBD kota juga menjadi kendala intervensi birokrasi dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur Sentra Dapur Komunal terstandar secara mandiri bagi para pelaku usaha mikro.

Faktor pendukung yang menjadi modal kekuatan daerah adalah ketersediaan infrastruktur fisik berupa 29 unit *Cold Storage* berskala makro yang telah mengantongi sertifikat kelayakan internasional HACCP dan memiliki jaringan ekspor yang mapan ke berbagai negara. Dukungan momentum politis dari pemerintah pusat melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan serta program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) membuka peluang pendanaan eksternal yang sangat potensial bagi daerah. Keberadaan teknologi mesin daging lumat terintegrasi milik DISPERINDAG yang siap difungsikan sebagai fasilitas bersama (*shared facility*) turut memperkuat kapasitas hilirisasi lanjutan bagi komunitas usaha kecil.

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah adanya tingkat resiliensi sosiologis yang sangat tinggi dari para pekerja perempuan pesisir yang mendominasi porsi 72,7 persen dari total tenaga kerja pengolahan perikanan lokal. Sektor industri kerakyatan ini terbukti mampu memproduksi hingga 3,81 juta kilogram komoditas pelumat daging secara mandiri dan swadaya pada tahun 2024 meskipun berada di bawah tekanan krisis pasokan kronis. Fenomena ini menegaskan bahwa modal sosial masyarakat perkotaan sudah sangat matang dan memiliki kesiapan penuh untuk melakukan transformasi industrialisasi berbasis *Blue Economy* jika mendapatkan afirmasi kebijakan legalitas formal yang tepat dari pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi pengembangan pengolahan perikanan berbasis *Blue Economy* di Kota Pangkalpinang dapat diwujudkan melalui formulasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek internal dan eksternal daerah secara komprehensif. Kondisi eksisting menunjukkan adanya fenomena "Paradoks Infrastruktur" di mana kapasitas raksasa gudang pendingin (*Cold Storage*) belum optimal dalam menciptakan nilai tambah daerah karena masih terfokus pada

aktivitas pembekuan primer untuk transit ekspor, sementara pelaku UMKM lokal terhambat masalah standardisasi mutu (SKP) serta rentan terhadap kelangkaan pasokan bahan baku dan hiperinflasi harga komoditas Tenggiri saat musim paceklik. Formulasi strategi lingkungan berdasarkan empat pilar *Blue Economy* merekomendasikan empat langkah intervensi utama, yaitu mendorong investasi korporasi pada lini *deep processing* melalui insentif daerah, membangun Sentra Pengolahan Terpadu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) KKP RI, menerbitkan kebijakan kewajiban alokasi cadangan stok (*buffer stock*) bagi korporasi besar disertai formalisasi kemitraan tata niaga lintas daerah, serta menata fisik demarkasi Pelabuhan TPI Ketapang dan merevisi tata ruang zonasi laut untuk memulihkan ekosistem pesisir.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada penerapan metode deskriptif kualitatif dengan desain pendekatan studi kasus tunggal, sehingga ruang lingkup analisis, penggalian informan, dan penafsiran maknanya dibatasi eksklusif pada wilayah administratif internal Kota Pangkalpinang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan secara lebih luas pada wilayah-wilayah penyangga (*hinterland*) regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Kabupaten Bangka Selatan, guna memetakan interkoneksitas dan keterpaduan rantai pasok hulu-hilir perikanan secara lebih komprehensif dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang beserta jajarannya yang telah memberikan izin, kesempatan, dan bantuan fasilitas bagi penulis untuk melaksanakan pengumpulan data penelitian. Penulis juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing serta tim dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga dalam penyempurnaan karya ini, serta seluruh pihak yang telah tulus membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andayani, P., Pamungkas, B. D., & Suprianto, S. (2025). Analisis strategi pengembangan budidaya perikanan berbasis blue economy. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, *4*(5), 1133–1138. https://doi.org/10.53625/juremi.v4i5.9954

Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. (2023). *Kota Pangkalpinang dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. https://pangkalpinangkota.bps.go.id

Bailey, M., Bush, S. R., Miller, A., & Kochen, M. (2016). The role of traceability in transforming seafood governance in the global South. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, *18*, 25–32. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.06.004

Crona, B., Nyström, M., Folke, C., & Jiddawi, N. (2010). Middlemen, a critical social-ecological link in coastal communities of Kenya and Zanzibar. *Marine Policy*, *34*(4), 761–771. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.01.023

Dewi, M. F., & Dadiara, F. S. (2022). Pemberdayaan kelompok nelayan melalui program sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Kabupaten Maluku Barat Daya. *J-3P (Jurnal*

Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), *7*(1), 82–100. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/2417

Farmery, A. K., Allison, E. H., Andrew, N. L., Troell, M., Voyer, M., Campbell, B., … Steenbergen, D. (2021). Blind spots in visions of a "blue economy" could undermine the ocean's contribution to eliminating hunger and malnutrition. *One Earth*, *4*(1), 28–38. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.12.002

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2024). *Data Statistik Unit Pengolahan Ikan dan Coldstorage*. Portal Satu Data KKP.

Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Panduan penyusumen instrumen pendanaan biru*. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

Kruijssen, F., Tedesco, I., Ward, A., Pincus, L., Love, D., & Thorne-Lyman, A. L. (2020). Loss and waste in fish value chains: A review of the evidence from low and middle-income countries. *Global Food Security*, *26*, 100434. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100434

Kurniawan, Angelika, C., & Aisyah, S. (2023). Strategi pengembangan perikanan bubu di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *8*(1), 1–11. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v18i1.11443

Maghfiroh, A., Setyaningrum, A., & Masduqi, E. (2024). Strategy for developing captured fisheries in Pemalang Regency. *Jurnal Perikanan*, *14*(4), 1764–1773. https://doi.org/10.29303/jp.v14i4.886

Malik, H., & Saribulan, N. (2018). Implementasi kebijakan usaha perikanan melalui program pengembangan perikanan tangkap di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *1*(2), 115–135. https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1101

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publications.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Prihatini, J., Elungan, P. C., & Rifai, M. (2022). Pemberdayaan kelompok nelayan melalui program sentra kelautan dan perikanan terpadu di Desa Dalum Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud: (Studi kelompok nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah). *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, *7*(1), 20–44 https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/2489

Puspitasari, D., Chasanah, A. N., & Wardhani, M. F. (2023). Strategi peningkatan ketahanan ekonomi untuk perikanan berkelanjutan berbasis konsep blue economy. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *18*(2), 215–225. https://doi.org/10.32534/jv.v18i2.3836

Rangkuti, F. (2018). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.

Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: what do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance? *Journal of Environmental Policy & Planning*, *20*(5), 595–616. https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153

World Bank, & UN DESA. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries.* Washington DC: World Bank Group.

Yusuf, M., Riana, A. D., Rusneni, Salawali, W. A., & Eddiwan. (2025). Sustainability analysis of fisheries and marine resource development in Indonesia's blue economy framework. *Biodiversitas: Journal of Biological Diversity*, *26*(7), 3634–3646.

https://doi.org/10.13057/biodiv/d260749

